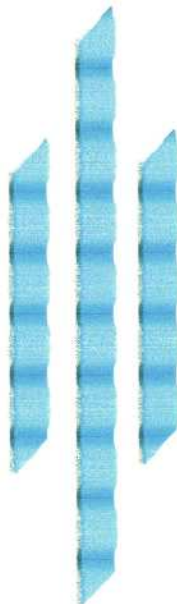




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERUBAHAN R E N S T R A
(PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2017-2022



BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

TAHUN 2020



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 86 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 100 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dan untuk tertibnya administrasi maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(14. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6042);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubahterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 poin a dan poin c diubah, sehingga Pasal 5 poin a dan c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan dan berfungsi untuk :

- a. Menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dan memberikan pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017-2022;
 - c. Sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan selaras dengan Renstra guna mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Renstra;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo;
- (3) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam Renstra Badan Keuangan Daerah ;
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang didalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh KepalaBappeda dan Litbang;

- (6) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti;
- (7) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal, 18-8-2020



Diundangkan di Muara Tebo,
Pada tanggal, 18-8-2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020 NOMOR⁸⁶.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena dengan atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Adapun salah satu tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 adalah untuk Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis Perangkat Daerah dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 ini. Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini dapat menjadi media peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo.

Muara Tebo, 13 Agustus 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



NAZAR EFENDI, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19800501 200212 1002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematikan Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.....	7
2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.....	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.2.2. Perlengkapan	15
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	16
2.3.1. Pelayanan pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	29
2.3.2. Pelayanan pada Bidang Pendapatan Daerah..	30
2.3.3. Pelayanan Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.....	34
2.4.1. Tantangan	34

2.4.2. Peluang	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	38
3.2.1. Telaahan Visi	38
3.2.2. Telaahan Misi.....	39
3.2.3. Talaahan Program.....	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi.....	41
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi.....	41
3.3.2. Telaahan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi.....	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	46
3.5. Penentuan isu-isu strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.1. Tujuan dan Sasaran	50
BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
6.1 Realisasi Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.....	57
6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021-2022.....	79
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...	91
BAB VIII PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Rencana Kerja Tahunan. Selain itu setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo ini juga disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Mengenai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Keuangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat di realisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Tebo dengan tetap memperhatikan kebijakan dari Kepala Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berharap dapat terus mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, keinginan ini menjadi komitmen yang dituangkan dalam bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berupa : "Perencanaan Strategis".

Disamping itu penyusunan Perubahan Renstra ini juga bertujuan untuk membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik selanjutnya dapat memberikan arah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan segenap aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Tercapainya sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo saat ini melaksanakan perubahan Renstra didasari dengan adanya perubahan yang mendasar terutama dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, Fungsi, Urusan, Program, Kegiatan, Sub Program, Indikator Kinerja dan Kode Rekening Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022; dan
 22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Badan Keuangan Daerah dalam pilihan program dan kegiatan tahunan, oleh karena itu isi dan substansinya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Program dan Pagu Indikatif dalam kurun waktu lima tahun. Renstra dimaksudkan juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2017-2022 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tebo. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui suatu rangkaian kegiatan secara terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan diatas Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis Perangkat Daerah dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo;
4. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
5. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah

tahun 2017 sampai dengan tahun 2022..

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
- 2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi::

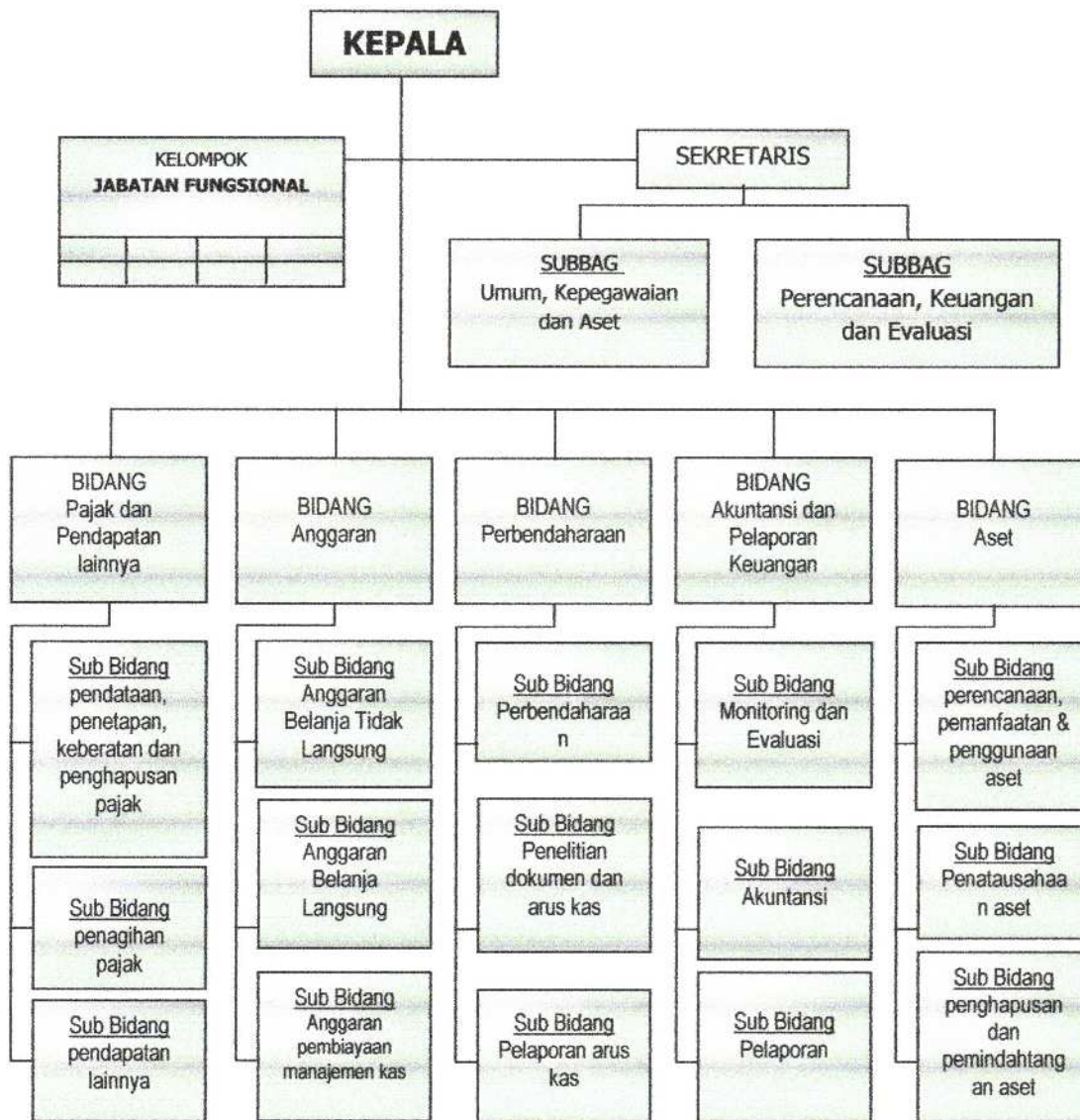
- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah berdasar peraturan perundang-undangan;
- b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan keuangan daerah;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Keuangan Daerah;
- e. penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- f. penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan & pengendalian aset daerah;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan dan pengendalian aset daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Badan Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan
 - 1) subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi
 - 2) subbagian umum, kepegawaian dan aset.
3. Bidang Pajak dan Pendapatan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan :
 - 1) subbidang pendataan, penetapan, keberatan dan penghapusan pajak

- 2) subbidang penagihan pajak
- 3) subbidang pendapatan lainnya.
4. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan :
 - 1) subbidang anggaran belanja tidak langsung;
 - 2) subbidang anggaran belanja langsung
 - 3) subbidang anggaran pembiayaan manajemen kas.
5. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan:
 - 1) subbidang perbendaharaan;
 - 2) subbidang penelitian dokumen dan arus kas;
 - 3) subbidang pelaporan arus kas.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan :
 - 1) subbidang monitoring dan evaluasi;
 - 2) subbidang akuntansi
 - 3) subbidang pelaporan.
7. Bidang Aset dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan :
 - 1) subbidang perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan aset;
 - 2) subbidang penatausahaan aset
 - 3) subbidang penghapusan dan pemindahtanganan aset.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara keseluruhan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo secara rinci pada tabel berikut :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran bidang keuangan;

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA

Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pendataan dan penetapan dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, pembebasan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pelaporan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pengoordinasian dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. pembinaan terhadap penatausahaan administrasi penerimaan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan

- Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. pelaksanaan koordinasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah instansi yang lebih tinggi baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dana percepatan, hibah dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyusun perencanaan dan pengembangan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - g. penerimaan, penelitian, pemeriksaan dan pemrosesan serta pengoordinasian penyelesaian pengajuan permohonan keberatan, banding dan keluhan masyarakat terhadap surat ketetapan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - h. penyajian informasi pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara tepat pada semua unit pelaksanaan secara terintegrasi;
 - i. penyiapan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sektor pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
 - j. pemeriksaan, pengoreksian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan kepada pimpinan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pengelolaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang pengelolaan anggaran daerah;

- c. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan administrasi anggaran daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan anggaran daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pelayanan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis manajemen perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang manajemen perbendaharaan;
- c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas perbendaharaan umum dan perbendaharaan gaji;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas manajemen perbendaharaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perbendaharaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;

- b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG ASET

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
- b. pengoordinasian dan melakukan penghimpunan dalam rangka penelaahan atas usulan rencana kebutuhan aset daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah kepada pejabat pengelola aset daerah;
- c. pengoordinasian penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta pengamanan aset daerah;
- d. pengoordinasian pengaturan pemanfaatan dan penggunaan aset daerah;
- e. pengoordinasian penetapan status penggunaan dan penguasaan aset daerah;
- f. pengoordinasian pengaturan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan pengendalian aset daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan jumlah pegawai s/d bulan Desember 2019 sebanyak 47 orang, yang secara keseluruhan dapat dilihat ada tabel dibawah :

Tabel 2.2
Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongan / Eselon

Kualifikasi Pendidikan																		
SD		SLTP		SLTA		DI/DIII		D IV		S-1		S-2		S-3		Jumlah		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
-	-	-	-	6	3	6	3	-	-	15	9	2	2	-	-	29	17	46

Kualifikasi Pangkat dan Golongan							
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	
L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	9	3	15	14	5	-

Struktural								Fungsional		Jumlah		
Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Jumlah						
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	-	5	1	8	9	14	9	15	7	29	17	46

Adapun jumlah pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat pangkat/golongan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah SDM sesuai Pangkat/Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Persentase
1	Pembina Utama Muda / IV.c	0	0.00%
2	Pembina Tingkat I / IV.b	2	4.34%
3	Pembina / IV.a	3	6.52%
4	Penata Tingkat I / III.d	7	15.21%
5	Penata / III.c	12	26.08%

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Persentase
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	6	13.04%
7	Penata Muda / III.a	4	8.69%
8	Pengatur Tingkat I / II.d	9	19.56%
9	Pengatur / II.c	2	4.34%
10	Pengatur Muda Tk I / II.b	1	2.17%
11	Pengatur Muda / II.a	0	0.00%
Jumlah		46	

Selain itu, pada bagian ini akan diuraikan keberadaan SDM pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan keikursertaan dalam pelatihan perjenjangan sesuai Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah SDM dalam pelatihan perjenjangan pada BKD
Kabupaten Tebo

No	Pendidikan	Jumlah
1	Diklatpim Tk. II	1 orang
1	Diklatpim Tk. III	3 orang
2	Diklatpim Tk. IV	13 orang
Jumlah		17 orang

2.2.2 Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo terletak di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Tebo- Bungo KM. 12 ².

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 8 buah dan roda 2 sebanyak 25 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta pembagian Hibah dan Bantuan Sosial sangat terasa masih sangat kurang.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik unit untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat yang terdiri dari komputer (PC) sebanyak 22 unit, Laptop sebanyak 40 unit dan

Note book sebanyak 5 unit. Printer sebanyak 46 buah dan server aplikasi sebanyak 8 buah. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagai mana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan, berikut capaian indikator Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2019 disajikan pada table 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2019

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indikator Kinerja Utama												
1	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo			Ya/tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Ya/tidak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%
3	Persentase serapan belanja daerah			Persen	89.54	92.57	89.90	89.54	95.46	94.17	100.00	103.12	104.74
4	Persentase Aset tetap yang dimanfaatkan			Persen	0.0068	0.0064	0.0076	0.0068	0.0064	0.0076	100.00	100.00	100.00
5	Persentase Aset tetap yang digunakan			Persen	99.93	99.93	99.95	99.93	99.93	99.95	100.00	100.00	100.00
6	Persentase capaian pendapatan daerah			Persen	95.00	96.00	97.00	95.69	100.47	99.24	100.73	104.66	102.31
7	Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			Persen	7.00	7.00	7.00	8.76	9.44	9.88	125.14	134.86	141.14
2	Indikator Kinerja Program												
1	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Persentase Disiplin Aparatur			Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
4	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi			Persen	10	20	30	10	20	31	100.00	100.00	103.33
5	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Ya/tidak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%
6	Persentase Capaian Target PAD			Persen	80	100	100	91.24	102.19	107.98	114.05	102.19	107.98
7	Persentase Legalitas Tanah Aset Pemerintah			Persen	30	33	35	31.50	33.00	35.00	105.00	100.00	100.00
8	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku			Dokumen	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00
9	Persentase Realisasi Serapan BL, BTL, Pembiayaan			Persen	89.54	95.46	89.90	89.54	95.00	94.17	100.00	99.52	104.75
10	Persentase Optimalisasi aset yang tidak lagi dimanfaatkan			Persen	0.0053	0.0053	0.0054	0.0053	0.0054	0.0043	100.00	101.89	79.63
11	Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah yang Wajar			Ya/tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%
12	Jumlah penyelenggaraan Pameran Investasi			Kali	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Badan Keuangan Daerah, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah periode perencanaan sebelumnya yang disajikan pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (per kegiatan) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Urusan wajib											
Pemerintahan umum											
BELANJA LANGSUNG	2,455,027,000	2,698,117,760	3,646,388,669	2,217,231,359	2,172,033,823	3,054,117,585	90.31	80.50	83.76	22.52	- 0.82
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,916,852,000.00	2,177,617,760.16	1,881,025,200.00	1,761,741,374.00	1,731,363,543.00	1,710,023,755.00	91.91	79.51	90.91	- 0.01	- 0.87
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	9,000,000.00	5,910,000.00	12,450,000.00	100.00	47.28	99.60	19.44	- 16.61
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	215,000,000.00	219,800,000.00	215,480,000.00	192,549,822.00	174,438,162.00	183,624,787.00	89.56	79.36	85.22	0.13	- 4.68
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	4,032,000.00	180,932,760.16	4,435,200.00	3,588,793.00	3,915,690.00	627,200.00	-	-	14.14	2,144.94	4.13
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	23,653,750.00	23,497,585.00	29,313,350.00	94.62	93.99	97.71	10.00	- 0.21
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	9,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,146,300.00	10,311,200.00	12,971,800.00	90.51	68.74	86.48	33.33	13.42
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	331,820,000.00	369,110,000.00	369,110,000.00	329,480,000.00	316,252,000.00	331,010,000.00	99.29	85.68	89.68	5.62	- 1.98

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	63,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	62,969,500.00	68,000,000.00	71,672,500.00	99.95	93.15	98.18	7.94	4.02
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	19,976,500.00	12,973,000.00	11,756,000.00	99.88	43.24	39.19	25.00	- 17.58
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	149,949,550.00	149,866,000.00	149,791,000.00	99.97	99.91	99.86	-	- 0.03
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62,000,000.00	80,275,000.00	75,000,000.00	61,399,000.00	70,552,400.00	73,450,750.00	99.03	87.89	97.93	11.45	7.47
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	9,984,600.00	14,990,200.00	14,923,000.00	99.85	99.93	99.49	25.00	25.06
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	279,000,000.00	242,000,000.00	106,500,000.00	253,346,500.00	210,627,181.00	95,678,250.00	90.81	87.04	89.84	- 34.63	- 8.70
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	80,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	79,795,000.00	80,000,000.00	94,730,000.00	99.74	100.00	94.73	12.50	0.22
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	75,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	43,560,300.00	45,504,000.00	62,147,000.00	58.08	70.01	95.61	- 6.67	2.41
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	437,341,759.00	462,516,125.00	499,878,118.00	87.47	92.50	99.98	-	2.92
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN	84,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	77,000,000.00	82,000,000.00	66,000,000.00	91.67	68.33	55.00	21.43	3.15
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,236,770,000.00	744,970,000.00	3,476,540,000.00	1,174,522,993.00	620,308,698.00	3,349,101,270.00	94.97	-	-	163.45	- 21.39

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	213,200,000.00	150,000,000.00	0	212,724,000.00	149,599,000.00	0	99.78	-	-	- 64.82	- 15.34
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	375,000,000.00	0	2,810,000,000.00	372,390,000.00	0	2,749,000,000.00	99.30	0.00	97.83	- 50.00	- 50.00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	323,500,000.00	102,000,000.00	0	298,049,000.00	101,790,000.00	0	92.13	99.79	0.00	- 84.23	- 33.42
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100,000,000.00	130,000,000.00	115,000,000.00	92,204,300.00	113,064,790.00	103,440,500.00	92.20	86.97	89.95	9.23	11.27
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	200,070,000.00	337,970,000.00	326,540,000.00	175,118,068.00	232,702,658.00	272,185,270.00	-	68.85	-	32.77	16.53
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	24,037,625.00	23,152,260.00	24,985,500.00	96.15	92.61	99.94	-	- 1.80
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	0	0	200,000,000.00	0	0	199,490,000.00	0.00	0.00	99.75	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	124,000,000.00	135,000,000.00	68,000,000.00	104,171,000.00	105,550,000.00	60,000,000.00	84.01	78.19	88.24	- 20.38	0.45
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	50,000,000.00	55,000,000.00	0	41,500,000.00	43,450,000.00	0	83.00	79.00	0.00	- 45.00	1.85
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	74,000,000.00	80,000,000.00	68,000,000.00	62,671,000.00	62,100,000.00	60,000,000.00	84.69	77.63	88.24	- 3.45	- 0.47
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	160,000,000.00	130,000,000.00	150,000,000.00	133,521,230.00	116,406,435.00	132,756,100.00	-	89.54	-	- 1.68	- 6.34
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	60,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	39,273,200.00	43,210,630.00	39,509,200.00	65.46	86.42	-	- 8.33	4.97

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	94,248,030.00	73,195,805.00	93,246,900.00	94.25	91.49	-	2.50	- 11.03
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	182,700,000.00	195,500,000.00	192,100,000.00	160,843,900.00	177,427,800.00	179,052,025.00	87.93	90.76	-	2.63	5.23
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16,125,000.00	15,000,000.00	6,300,000.00	13,875,000.00	11,525,000.00	3,200,000.00	86.05	76.83	-	- 32.49	- 8.83
PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	8,800,000.00	8,800,000.00	2,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	2,000,000.00	71.59	71.59	100.00	- 38.64	- 0.34
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	10,375,000.00	10,000,000.00	3,200,000.00	6,875,000.00	6,500,000.00	2,725,000.00	66.27	65.00	65.16	- 35.81	- 3.02
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN/ RKT	22,400,000.00	25,200,000.00	14,600,000.00	16,593,900.00	20,043,600.00	13,576,800.00	74.08	79.54	92.99	- 14.78	10.23
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	114,800,000.00	136,500,000.00	102,900,000.00	107,900,000.00	133,059,200.00	95,190,905.00	93.99	97.48	92.51	- 2.66	11.52
MONITORING EVALUASI REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	0	0	63,100,000.00	0	0	62,359,320.00	0.00	0.00	-	-	-
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	10,200,000.00	0	0	9,100,000.00	0	0	89.22	0.00	0.00	- 50.00	- 50.00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,732,107,750.00	5,802,296,500.00	6,031,540,900.00	4,699,782,808.00	4,654,388,456.00	5,344,328,338.00	81.99	83.08	88.61	2.70	- 0.41

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA	154,500,000.00	200,000,000.00	194,600,000.00	117,405,300.00	148,650,600.00	187,903,700.00	75.99	74.33	96.56	13.37	13.44
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN ASET DAERAH	199,850,000.00	290,000,000.00	203,450,000.00	192,313,200.00	236,138,400.00	166,102,283.00	96.23	81.43	-	7.63	11.25
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	339,300,000.00	400,000,000.00	489,050,000.00	252,499,719.00	387,263,701.00	480,400,500.00	74.42	96.82	-	20.08	26.81
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	241,200,000.00	237,000,000.00	219,600,000.00	186,001,947.00	218,453,498.00	207,067,431.00	77.12	92.17	-	- 4.54	8.70
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	101,650,000.00	110,000,000.00	116,650,000.00	101,514,400.00	105,936,000.00	116,490,700.00	99.87	96.31	99.86	7.13	2.23
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	101,650,000.00	110,000,000.00	84,850,000.00	96,555,635.00	102,129,200.00	84,849,900.00	94.99	92.84	100.00	- 7.32	2.80
SOSIALISASI DAN BIMTEK PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	181,900,000.00	214,825,000.00	177,675,000.00	130,946,800.00	192,702,622.00	176,391,565.00	-	-	-	0.40	23.54
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH	180,824,000.00	182,400,000.00	0	125,394,350.00	162,995,000.00	0	-	-	-	- 49.66	14.49
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	670,541,500.00	359,612,500.00	818,095,000.00	476,261,800.00	246,248,500.00	752,943,872.00	71.03	68.48	92.04	40.56	- 23.12
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	422,200,000.00	389,600,000.00	694,500,000.00	287,807,697.00	315,108,655.00	447,285,077.00	68.17	85.26	64.40	37.72	4.95

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PENATAAN ADMINISTRASI PEMBELANJAAN DAN PERBENDEHARAAN KEUANGAN DAERAH	394,100,000.00	396,500,000.00	318,200,000.00	349,423,331.00	374,510,085.00	298,505,983.00	88.66	93.98	93.81	- 9.52	3.49
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN GAJI KABUPATEN TEBO	411,689,250.00	388,509,000.00	367,600,000.00	405,810,768.00	383,883,398.00	358,868,161.00	98.57	98.81	97.08	- 5.51	- 2.74
PENYUSUNAN PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	22,000,000.00	0	0	7,330,000.00	0	0	33.32	0.00	0.00	- 50.00	- 50.00
PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENATAAN ASET/BARANG	299,600,000.00	250,000,000.00	225,500,000.00	276,324,338.00	183,335,239.00	168,168,500.00	92.23	-	-	- 13.18	- 16.87
INVENTARISASI/LABELISASI ASET DAERAH	428,000,000.00	548,000,000.00	534,700,000.00	387,160,170.00	395,853,666.00	465,989,000.00	90.46	-	-	12.81	1.21
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN KABUPATEN TEBO	58,850,000.00	65,000,000.00	56,600,000.00	51,852,800.00	62,219,200.00	56,600,000.00	88.11	95.72	100.00	- 1.24	9.95
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN KABUPATEN TEBO	114,276,000.00	125,000,000.00	106,714,000.00	105,101,500.00	119,460,889.00	105,273,700.00	91.97	95.57	98.65	- 2.62	6.77
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN KABUPATEN TEBO	85,912,000.00	75,000,000.00	76,200,000.00	62,055,600.00	69,649,700.00	75,866,600.00	94.15	92.87	99.56	7.69	6.16
PENYUSUNAN BAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH	65,400,000.00	126,000,000.00	0	47,862,600.00	81,243,485.00	0	73.18	64.48	0.00	- 3.67	34.37

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH	259,400,000.00	122,900,000.00	95,000,000.00	238,749,000.00	114,156,000.00	72,376,737.00	92.04	92.89	76.19	- 37.66	- 26.28
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CALON WAJIB PAJAK DAERAH	71,000,000.00	110,000,000.00	0	40,500,500.00	69,266,400.00	0	57.04	62.97	0.00	- 22.54	35.01
PENETAPAN PAJAK DAERAH	322,350,000.00	238,100,000.00	322,500,000.00	288,912,000.00	181,954,282.00	305,334,000.00	89.63	76.42	94.68	4.66	- 18.17
PENAGIHAN PAJAK DAERAH	194,000,000.00	124,000,000.00	309,500,000.00	158,904,160.00	109,308,200.00	259,205,100.00	81.91	88.15	83.75	56.76	- 14.92
PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB SERTA PENGELOLAAN BASIS INFORMASI PAJAK	122,215,000.00	96,200,000.00	0	77,986,600.00	42,593,442.00	0	63.81	44.28	0.00	- 60.64	- 23.19
EVALUASI PAJAK DAERAH	103,700,000.00	131,700,000.00	0	58,728,400.00	113,037,294.00	0	56.63	85.83	0.00	- 36.50	45.74
PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL	206,000,000.00	232,500,000.00	173,176,900.00	176,380,193.00	212,292,300.00	173,061,873.00	85.62	91.31	99.93	- 6.33	10.09
Penyusunan Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah	0	97,450,000.00	0	0	68,584,800.00	0	0.00	70.38	0.00	- 50.00	- 0.50
PENGAMANAN KEPEMILIKAN ASET/BARANG MILIK DAERAH	0	200,000,000.00	289,730,000.00	0	106,064,500.00	258,717,566.00	0.00	53.03	89.30	22.43	0.72
SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	0	0	157,650,000.00	0	0	126,906,090.00	0.00	0.00	81.77	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	32,740,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	32,411,350.00	24,490,500.00	34,067,000.00				3.45	- 12.02
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	32,740,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	32,411,350.00	24,490,500.00	34,067,000.00	99.00	69.97	97.33	3.45	- 12.02

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	156,150,000.00	-	156,150,000.00	-	-	150,838,993.00				- 50.00	-
PENYUSUNAN DOKUMEN KUA DAN PPAS	156,150,000.00	0	156,150,000.00	0	0	150,838,993.00	0.00	0.00	96.60	- 50.00	-

Berikut akan digambarkan kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah serta sebagai bahan bagi BAKEUDA dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Untuk mengukur kinerja pelayanan selama tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tingkat pencapaian beberapa indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2018-2019.
2. Indikator Kinerja Renstra BAKEUDA Tahun 2018-2019.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kabupaten Tebo Tahun 2018-2019.

Kinerja Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 dilihat berdasarkan tingkat pencapaian indikator sebagai berikut :

- Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2018-2019

Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja RPJMD yang menjadi tanggungjawab BAKEUDA selama masa periode 2018-2019, tersaji dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Tebo
Tahun 2018-2019

No	Uraian	Satuan	2018		2019	
			Target	Pencapaian	Target	Pencapaian
1	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	92,57	95,46	89,90	94,17
4	Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan	%	0,0064	0,0064	0,0076	0,0076
5	Persentase Aset Tetap yang digunakan	%	99,93	99,93	99,95	99,95
6	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	96,00	100,47	97,00	99,24
7	Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	7,00	9,44	7,00	9,88

Dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tebo Khusus yang menjadi kinerja bagi BAKEUDA Kabupaten Tebo, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tebo
Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018		2019	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP

Berikut ini akan diuraikan tentang pelayanan yang telah diselenggarakan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugasannya pada bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah dan pendapatan daerah sesuai dengan urusan yang ditangani khususnya pada administrasi keuangan yaitu sebagai berikut:

2.3.1. Pelayanan Pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terwujudnya Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2016-2020 opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tebo disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tebo
Periode Tahun 2016 s/d 2020.

Tahun	Opini	Keterangan
2016	WTP	LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015
2017	WTP	LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016
2018	WTP	LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017
2019	WTP	LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018
2020	WTP	LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019

Selama periode tahun 2016- 2020, Pemerintah Kabupaten Tebo berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Kabupaten Tebo. Diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun 2016-2020 tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lain adalah serapan belanja daerah setiap tahunnya. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan bidang tugas BAKEUDA untuk mengatur manajemen kas sehingga pembayaran belanja daerah dapat tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal.

Selama tiga tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 serapan belanja daerah setiap tahunnya sebagaimana pada grafik sebagai berikut:



2.3.2. Pelayanan Pada Bidang Pendapatan Daerah.

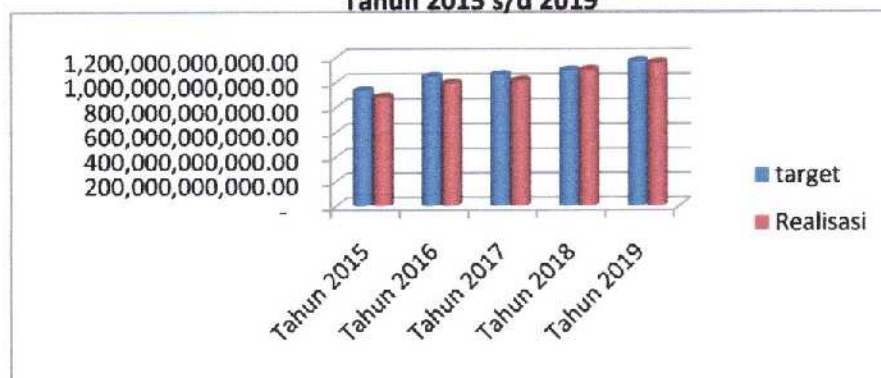
Pendapatan daerah merupakan unsur penting sebagai sumber dana untuk membiayai terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi

kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang dapat dilihat dengan meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal.

BAKEUDA sebagai salah satu SKPD penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang mengelola pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai landasan pemungutan pajak daerah adalah dengan ditetapkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur sembilan jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

Selama periode tahun 2015-2019 perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tebo disajikan pada tabel sebagai berikut:

Grafik 2.2
Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 s/d 2019



Sumber data : BAKEUDA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2019 (audited), diolah

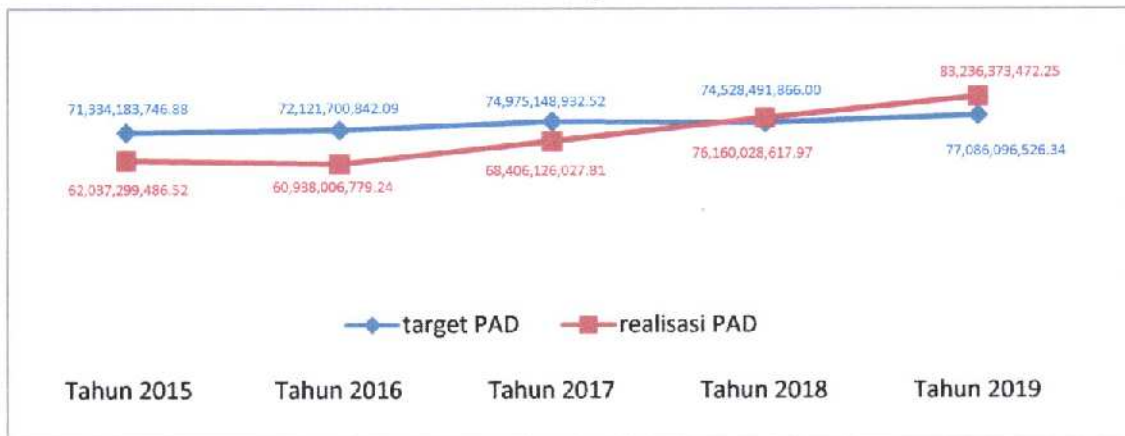
Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian pendapatan daerah setiap tahunnya hampir mencapai 100% sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 s/d 2019



Capaian Kinerja BAKEUDA sebagai SKPD penghasil dapat dilihat dengan memperhatikan tabel berikut tentang target dan capaian pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Grafik 2.4
Pertumbuhan Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2015 s/d 2019



Sumber data : BAKEUDA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2019 (audited), diolah

Grafik tersebut diatas menggambarkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2015-2019, pendapatan asli daerah yang dikelola oleh BAKEUDA menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahun bahkan pada tahun 2018 dan 2019 realisasi PAD mengalami over target.

2.3.3. Pelayanan Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian persentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BAKEUDA sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset

atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang Daerah.

Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BAKEUDA sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan. Sehingga dengan dilaksanakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.

Perkembangan barang milik daerah/aset tetap Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun tahun 2017 s/d 2019 disajikan pada grafik dan tabel sebagai berikut :

Grafik 2.5
Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun 2017 s/d 2019



Sumber data : BAKEUDA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2019 (audited), diolah

Tabel 2.5
Pertumbuhan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun 2017 s/d 2019

Uraian	Rupiah	%
Tahun 2017	(99,092,103,582.07)	-5%
Tahun 2018	52,522,237,880.09	3%
Tahun 2019	50,393,943,803.89	3%

Sumber data : BAKEUDA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2019 (audited), diolah

Tabel 2.6
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tebo Berdasarkan Jenis
Periode Tahun 2017 s/d 2019

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Tanah	114,385,169,533.76	114,532,015,429.44	114,772,628,393.53
Peralatan dan Mesin	308,826,095,242.00	326,703,864,055.79	355,008,977,072.85
Gedung dan Bangunan	822,273,343,746.33	863,360,320,117.55	921,424,092,637.91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,033,987,690,335.84	2,276,072,501,975.87	2,474,047,757,601.88
Aset Tetap Lainnya	43,304,505,553.00	31,136,007,575.00	31,919,643,107.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	79,426,086,495.91	36,701,381,256.76	30,186,799,016.08
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(1,489,191,666,546.48)	(1,682,972,628,169.96)	(1,911,432,491,784.91)
Jumlah Aset Tetap	1,913,011,224,360.36	1,965,533,462,240.45	2,015,927,406,044.34

Sumber data : BAKEUDA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2019 (audited), diolah

Selama tiga tahun pertama pada periode tahun 2017-2019 aset tetap Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. BAKEUDA selaku pembantu pengelola barang daerah dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang pengelolaan barang milik daerah juga sedang melakukan upaya pengamanan asset pemerintah khususnya aset tanah dengan mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah yang belum memiliki sertifikat. Sampai Tahun 2020 dari 717 persil tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tebo, yang telah bersertifikat sejumlah 296 Persil dan sedangkan yang masih diproses di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo sebanyak 155 berkas persil tanah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kinerja pada kurun waktu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan Badan Keuangan Daerah:

- Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Tebo Menuju Tebo "TUNTAS" Tahun 2022.
- Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran dimaksud.
- Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kondisi pendidikan dan pendapatannya maka semakin tinggiuntutannya terhadap kualitas pelayanan sehingga harus ada upaya terus menerus untuk melakukan peningkatan pelayanan (publik).
- Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan merupakan tantangan lain yang harus dihadapi.
- Pada Tahun 2017 dan 2019 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi pada tahun 2020 dan seterusnya.

2.4.2 Peluang

Selain adanya tantangan tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yaitu sebagai berikut :

- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah.
- Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah.
- Adanya komitmen Pimpinan dan semua pegawai.
- Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Tebo.
- Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Renstra termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tebo, yakni: "Masih Belum Optimalnya Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tebo". Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tebo tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
3. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan
5. Belum optimalnya perwujudan keamanan dan ketertiban daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, maka peran Badan Keuangan Daerah sangat penting dalam merencanakan dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Tebo. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.

2. Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.
3. Terbatasnya SDM aparatur terkait dengan bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuai kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah.
4. Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat.
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja dinas.
7. Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Tupoksi Badan Keuangan Daerah	Permasalahan
a perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah berdasar peraturan perundang-undangan	1 Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.
b pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah	2 Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.
c pengoordinasian penyelenggaraan keuangan daerah	3 Terbatasnya SDM aparatur terkait dengan bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuai kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah.
d penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Keuangan Daerah	4 Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
e penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan daerah sesuai dengan kewenangan daerah	5 Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat.
f penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan & pengendalian aset daerah	

Tupoksi Badan Keuangan Daerah	Permasalahan
g pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan dan pengendalian aset daerah	6 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja dinas.
h pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan	7 Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (<i>hardware</i>) maupun perangkat lunak (<i>software</i>).
i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati

3.2.1. Telaahan Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah **"TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)"**

Maksud dari Visi tersebut adalah :

- TERTIB** : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
- UNGGUL** : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- TENTRAM** : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
- ADIL** : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- SEJAHTERA** : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Misi I

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;

2. Misi II

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;

3. Misi III

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

4. Misi IV

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan

5. Misi V

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tebo tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan. Untuk melaksanakan peran Badan Keuangan Daerah telah disusun Indikator Kinerja Utama yang dijadikan sebagai pedoman didalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya.

3.2.2. Telaahan Misi

Misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017-2022 yang berhubungan dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan yaitu Misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017-2022 "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)**". Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka Badan Keuangan Daerah maka Badan Keuangan Daerah juga telah menetapkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan strategi yang akan diambil didalam upaya mendukung tercapainya misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo Periode 2017-2022.

3.2.3. Telaahan Program

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo Periode Tahun 2017–2022 mempunyai 10 (sepuluh) prioritas program yang akan diwujudkan selama lima tahun. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berupaya mendukung prioritas program tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Prioritas program kelima yaitu : Prioritas program Implementasi Reformasi Birokrasi dengan Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)				
No	Misi dan Program KDH dan Wa KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			
	Program :	a		
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.	Sinergisitas organisasi perangkat daerah penghasil PAD tidak optimal.	Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
	2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	b		
	3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.	Kualitas pengelola keuangan SKPD masih kurang memadai	Komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Tebo melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
	4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	c		
		Terbatasnya SDM aparatur terkait dengan bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuai kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah.	Kualitas dan kinerja sumber daya manusia belum optimal	Komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo untuk menjadikan BAKEUDA sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)				
No	Misi dan Program KDH dan Wa KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		d Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.	Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah	Peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah
		e Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat .	Kualitas SDM aparatur belum terdistribusi secara ideal.	Peningkatan kualitas SDM.
		f Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SDM aparatur belum terdistribusi secara ideal.	Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel
		g Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (<i>hardware</i>) maupun perangkat lunak (<i>software</i>).	Sarana dan prasarana Teknologi Informasi gedung kantor masih kurang memadai	Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, proyeksi dan pengambilan keputusan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah :

‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif,

Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Keuangan menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah:
 - a. Meningkatnya tax ratio;
 - b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
 - c. Terjaganya defisit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
 - c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan Negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang fit for purpose;
 - b. SDM yang kompetitif;

- c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Tabel 3.3

Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan		Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo		Faktor	
				Penghambat	Pendorong
a.	Meningkatnya tax ratio;	a	Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.	Sinergisitas organisasi perangkat daerah penghasil PAD tidak optimal.	Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
b.	Terjaganya rasio utang pemerintah;				
c.	Terjaganya disiplin anggaran.	b	Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.	Kualitas pengelola keuangan SKPD masih kurang memadai	Komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Tebo melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
d.	Penerimaan pajak negara yang optimal;				
e.	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;	c	Terbatasnya SDM aparatur terkait dengan bidang tugas yang ditangani atau masih belum sesuai kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah.	Kualitas dan kinerja sumber daya manusia belum optimal	Komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo untuk menjadikan BAKEUDA sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
f.	Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.				
g.	PNBP yang optimal	d	Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.	Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah	Peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah
h.	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;				
i.	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.				
j.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;	e	Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat.	Kualitas SDM aparatur belum terdistribusi secara ideal.	Peningkatan kualitas SDM.
k.	Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.				
l.	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management	f	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SDM aparatur belum terdistribusi secara ideal.	Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel
m.	Organisasi yang fit for purpose;				
n.	SDM yang kompetitif;	g	Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (<i>hardware</i>) maupun perangkat lunak (<i>software</i>).	Sarana dan prasarana Teknologi Informasi gedung kantor masih kurang memadai	Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, proyeksi dan pengambilan keputusan
o.	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;				
p.	Peningkatan kepercayaan publik terhadap				

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jambi adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan administrasi perkantoran.
- Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipatif.
- Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Dan sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Provinsi Jambi adalah :

1. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan tata laksana perkantoran serta pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sehingga dapat menunjang pembangunan di Provinsi Jambi dan dapat mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Tabel 3.4 dibawah ini menjelaskan permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo terkait dengan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Tabel 3.4

Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Keungan Daerah Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan tata laksana perkantoran serta pelayanan administrasi perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola, kelembagaan dan tata laksana perkantoran serta pelayanan administrasi perkantoran belum berjalan secara optimal Belum meratanya kemampuan teknis SDM Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum berjalan secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap Susunan Perangkat Daerah yang mengalami beberapa kali penyesuaian. Adanya rotasi SDM. Belum semua SDM memahami dan menjalankan SPM dan SOP dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adanya SOP yang mengatur tentang kelembagaan dan tata laksana serta pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan tata laksana perkantoran serta pelayanan administrasi perkantoran Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah belum terlaksana secara optimal Terbatasnya jumlah SDM pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Terbatasnya Sarana dan Prasarana pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum memadai Cepatnya perubahan beberapa peraturan tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa Peraturan Perundangan-undangan yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan. Tersedianya beberapa aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan aset daerah Masyarakat semakin kritis, informasi semakin terbuka
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Masih tingginya tunggakan piutang pajak dan retribusi Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan pendapatan asli daerah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah belum terdata dengan optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan pendapatan asli daerah Kurangnya komitmen beberapa SKPD yg memiliki pendapatan dalam mencapai target Belum tersedianya data yang akurat tentang potensi pajak dan retribusi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi dan sumber-sumber PAD yang tersedia Tersedianya anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kedepannya Kabupaten Tebo berupaya mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Sebagai acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan

6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat agroindustri;
2. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
3. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
4. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
5. Pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
6. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam tupoksinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tidak secara langsung berkaitan dengan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis pada Badan Keuangan Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Sebagai instansi pemerintah dalam pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah perlu mengetahui kondisi elemen internal yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) dan *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Kelemahan, Kekuatan dan Peluang serta Ancaman

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dan disiplin kerja yang tinggi dari seluruh PNS 2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Tersedianya anggaran yang cukup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak dan Retribusi Daerah 3. Belum tersedianya data potensi Pendapatan Asli Daerah 4. Belum tersedia semua database wajib pajak dan wajib retribusi daerah 5. Masih terdapat beberapa regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki
PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah. 2. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah. 3. Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah. 4. Adanya komitmen Pimpinan dan semua pegawai. 5. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Tebo. 6. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi kewenangan daerah dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. 2. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi masih rendah 3. Masih kurangnya komitmen Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya 4. Cepatnya perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 5. Belum optimalnya penyediaan instrument dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. 6. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 7. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok. 8. Kurangnya koordinasi antara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dengan PPK dan PPTK di Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis di atas, maka isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang ditandai dengan masih adanya sejumlah temuan pemeriksaan BPK, rendahnya serapan APBD dan masih banyaknya barang milik daerah yang belum memiliki legalitas formal.
3. Peningkatan mutu pelayanan.
4. Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara nasional kepada Kabupaten Tebo yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah **“Mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel”** dengan Indikator Tujuan BAKEUDA adalah Opini BPK dan Persentase capaian pendapatan daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo adalah:

1. Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel
2. Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib
3. Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah

Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020 adalah :

1. Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel
Indikator sasaran :
 - a. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo
 - b. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Persentase Serapan Belanja Daerah

2. Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib

Indikator Sasaran :

- a. Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan
- b. Persentase Aset Tetap yang di Gunakan

3. Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah

Indikator Sasaran :

- a. Persentase Capaian Pendapatan Daerah
- b. Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui lebih jelas capaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat Pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

**Capaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian		Target		
					2018 (Kondisi Awal)	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK	Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase Serapan Belanja Daerah	95,46%	94,17%	90,00%	95,00%	90,00%
			Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan	0,0064%	0,0076%	0,0079%	0,0081%	0,0079%
				Persentase Aset Tetap yang di Gunakan	99,93%	99,95%	99,97%	99,98%	99,97%
		Persentase capaian pendapatan daerah	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	100,47%	99,24%	98,00%	98,00%	98,00%
				Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	9,44%	9,88%	7,50%	8,00%	8,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam menentukan strategi adalah analisis SWOT (*Strength* / kekuatan, *weakness* / kelemahan, *Opportunities* / peluang, *threat* / tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil-hasil pembangunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah dilaksanakan pada Tahun 2018, 2019, 2020 (tahun berjalan) strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah mengalami sedikit perubahan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tebo. Perubahan strategi dan kebijakan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang belum terantisipasi serta perubahan-perubahan asumsi makro pembangunan dan pendanaan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022

VISI		TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)			
MISI III		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1		2		2	3
Mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	(1) Opini BPK	(1) Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Menciptakan tata kelola keuangan yang baik melalui birokrasi yang efektif efesiensi berbasis teknologi informasi

VISI		TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)			
MISI III		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1		2		2	3
	(2) Persentase capaian pendapatan daerah		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tata kelola keuangan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan	(1) Penerapan SIMDA
					(2) Pelaksanaan BIMTEK untuk peningkatan pemahaman OPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah
			Persentase Serapan Belanja Daerah	Perencanaan Penatausahaan pelaporan Keuangan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku	Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan
		(2) Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan	Menegakan aturan pemanfaatan aset	Penertiban pemanfaatan aset sesuai aturan
			Persentase Aset Tetap yang di Gunakan	Penggunaan aset tetap sesuai tupoksi	Penetapan status penggunaan aset
		(3) Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang menjadi sumber PAD	Menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah
			Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatkan PAD	Peningkatan Kemandirian Keuangan

Pada tahun ini pembangunan Kabupaten Tebo difokuskan pada percepatan pemulihan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari pandemi covid-19 di Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga Kabupaten Tebo dapat menjadi daerah yang mempunyai potensi produk unggulan dengan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah. Dengan penjabaran prioritas/arah pembangunan sebagai berikut:

- 1). Pemenuhan Fasilitas Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Dasar (Jalan, air bersih dan sanitasi)
- 2). Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Layanan Pendidikan
- 3). Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Layanan Kesehatan
- 4). Pengembangan Kekayaan Budaya Dan Pariwisata Daerah
- 5). Implementasi Reformasi Birokrasi
- 6). Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- 7). Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan lapangan kerja
- 8). Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

- 9). Peningkatan antisipasi degradasi lingkungan hidup
10). Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan memberikan hasil yang nyata dan mampu dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai rumusan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dalam perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dan Program Pembangunan Daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka rumusan arah kebijakan Tahun 2021-2022 dalam dokumen Perubahan Renstra dijabarkan dalam program prioritas pembangunan yang dilampirkan pada Tabel 5.2 dan 5.3 berikut ini.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2022

VISI : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)					
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	(1) Opini BPK	(1) Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	(1) Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Menciptakan tata kelola keuangan yang baik melalui birokrasi yang efektif efisiensi berbasis teknologi informasi
			(3) Persentase Serapan Belanja Daerah	Perencanaan Penatausahaan pelaporan Keuangan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku	Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan
			(2) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tata kelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku	(1) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
		(2) Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib	(1) Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan	Penguatan Regulasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	(2) Pelaksanaan BIMTEK untuk peningkatan pemahaman OPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Penyusunan Regulasi yang jelas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang

VISI : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)					
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				(BMD)	berlaku
			(2) Persentase Aset Tetap yang di Gunakan	Penggunaan aset tetap sesuai tupoksi	Penetapan status penggunaan aset
	(2) Persentase capaian pendapatan daerah	(3) Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang menjadi sumber PAD	Menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah
			Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatkan PAD	Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 5.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2022 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Strategi	Arah kebijakan	Program	Indikator Program
Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Menciptakan tata kelola keuangan yang baik melalui birokrasi yang efektif efisiensi berbasis teknologi informasi	Program pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD terbit sesuai dengan yang berlaku
Perencanaan Penatausahaan pelaporan Keuangan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku	Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan		Persentase dokumen keuangan daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tata kelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku	(1) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Pelaksanaan BIMTEK untuk peningkatan pemahaman OPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah		Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang sesuai SAP
Penguatan Regulasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik (BMD)	Penyusunan Regulasi yang jelas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD Yang Sesuai Dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Penggunaan aset tetap sesuai tupoksi	Penetapan status penggunaan aset		
Meningkatkan PAD	Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian target pendapatan daerah

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab V, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo menetapkan program-program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 – 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disajikan dalam Tabel 6.1 dan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan dalam Tabel 6.2

Tabel 6.1
Realisasi Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	(1) Opini BPK	(1) Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	(1) Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo																	
	(2) Persentase capaian pendapatan daerah		(2) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			(3) Persentase serapan belanja daerah																	
		(2) Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib	(1) Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan																	
			(2) Persentase Aset Tetap yang di Gunakan																	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		(3) Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	(1) Persentase capaian pendapatan daerah																	
			(2) Persentase Rasio Kemandirian keuangan daerah																	
				5.2	BELANJA LANGSUNG			8,113,808,055.00		8,113,808,055.00		7,578,576,032.00		10,960,167,461.00		9,562,428,360.00		8,906,035,324.00		
				4.01.4.04.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	1,761,741,374.00	100%	1,761,741,374.00	100%	1,731,353,543.00	100%	1,710,023,755.00	100%	1,716,300,000.00	100%	1,479,021,899.00		
				4.01.4.04.02.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	2449 Lembar	9,000,000.00	2449 Lembar	9,000,000.00	2449 Lembar	5,910,000.00	2449 Lembar	12,450,000.00	2449 Lembar	72,500,000.00	2449 Lembar	72,500,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.01.4.04.02.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Periode Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	1 Tahun	192,549,822.00	1 Tahun	192,549,822.00	1 Tahun	174,438,162.00	1 Tahun	183,624,787.00	1 Tahun	224,800,000.00	1 Tahun	229,521,899.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.04	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	Jumlah pegawai non PNS penerima BPJS Ketenagakerjaan	26 Orang	3,588,793.00	26 Orang	3,588,793.00	26 Orang	3,915,690.00	28 Orang	627,200.00	30 Orang	5,000,000.00	29 Orang	5,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.05	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang di asuransikan	4 unit	23,653,750.00	4 unit	23,653,750.00	4 unit	23,497,585.00	7 unit	29,313,350.00	7 unit	30,000,000.00	7 unit	45,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	30 unit	8,146,300.00	30 unit	8,146,300.00	30 unit	10,311,200.00	30 unit	12,971,800.00	30 unit	15,000,000.00	30 unit	15,000,000.00	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APSD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.01.4.04.02.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	Periode Pembayaran n Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	329,480,000.00	1 Tahun	329,480,000.00	1 Tahun	318,262,000.00	1 Tahun	331,010,000.00	1 Tahun	369,000,000.00	1 Tahun	369,000,000.00	Sekretariat	
						Jumlah tenaga administrasi keuangan	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah tenaga Kebersihan yang dibayarkan honorarnya	4 Orang	62,969,500.00	4 Orang	62,969,500.00	4 Orang	68,000,000.00	4 Orang	71,672,500.00	4 Orang	85,000,000.00	4 Orang	85,000,000.00	Sekretariat	
						Jumlah jenis peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis			
				4.01.4.04.02.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	Jenis peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki	10 Jenis	19,976,500.00	10 Jenis	19,976,500.00	10 Jenis	12,973,000.00	10 Jenis	11,756,000.00	10 Jenis	30,000,000.00	10 Jenis	20,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah alat tulis yang tersedia	1 Paket	149,949,550.00	1 Paket	149,949,550.00	1 Paket	149,866,000.00	1 Paket	149,791,000.00	1 Paket	160,000,000.00	1 Paket	160,000,000.00	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jewab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.01.4.04.02.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Periode Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggandaan	1 Tahun	81,399,000.00	1 Tahun	81,399,000.00	1 Tahun	70,552,400.00	1 Tahun	73,450,750.00	1 Tahun	85,000,000.00	1 Tahun	85,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	10 Jenis	9,984,600.00	10 Jenis	9,984,600.00	10 Jenis	14,990,200.00	10 Jenis	14,923,000.00	10 Jenis	15,000,000.00	10 Jenis	15,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	5 Jenis	253,346,500.00	5 jenis	253,346,500.00	5 Jenis	210,627,181.00	5 jenis	95,678,250.00	5 jenis	75,000,000.00	5 jenis	33,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 Jenis	79,795,000.00	30 Jenis	79,795,000.00	30 Jenis	80,000,000.00	30 Jenis	94,730,000.00	30 Jenis	80,000,000.00	30 Jenis	60,000,000.00	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.01.4.04.02.01.17	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	Periode penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	1 Tahun	43,560,300.00	1 Tahun	43,660,300.00	1 Tahun	48,504,000.00	1 Tahun	62,147,000.00	1 Tahun	70,000,000.00	1 Tahun	35,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Periode rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti	1 Tahun	437,341,759.00	1 Tahun	437,341,759.00	1 Tahun	482,518,125.00	1 Tahun	499,878,118.00	1 Tahun	400,000,000.00	1 Tahun	250,000,000.00	Sekretariat	
				4.01.4.04.02.01.20	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIK PERKANTORAN	Jumlah Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia	7 Orang	77,000,000.00	7 Orang	77,000,000.00	7 Orang	82,000,000.00	6 Orang	66,000,000.00		-		-	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,174,522,993.00	100%	1,174,522,993.00	100%	620,308,698.00	100%	3,349,101,270.00	100%	936,670,000.00	100%	657,118,425.00		
				4.04.4.04.02.02.03	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	1 Gedung	212,724,000.00	1 Gedung	212,724,000.00	1 Gedung	149,599,000.00	1 Gedung	-		-		-	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.02.05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas/oprasi- nal yang dibeli	2 unit kendaraan dinas roda 4	372,390,000.00	2 unit kendaraan dinas roda 4	372,390,000.00	-	-	5 unit kendar- aan dinas roda 4	2,749,000,000.00		-	-		Sekretariat	
				4.04.4.04.02.02.07	PENGADAAN PERLENGKA- PAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1 unit	298,049,000.00	1 unit	298,049,000.00	2 unit	101,790,000.00	-	-	1 unit	350,000,000.00	1 unit	243,988,425.00	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.02.08	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DI- NAS	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis	50,000,000.00	5 jenis	59,500,000.00		
				4.04.4.04.02.02.22	PEMELIHARA- AN RUTIN/BERK- ALA GEDUNG KANTOR	Periode pemeliharaan Gedung kantor	1 Tahun	92,204,300.00	1 Tahun	92,204,300.00	1 Tahun	113,084,790.00	1 Tahun	103,440,500.00	1 Tahun	139,000,000.00	1 Tahun	54,000,000.00	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04 4.04.0 2.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	30 unit	175,118,068.00	30 unit	175,118,068.00	30 unit	232,702,858.00	30 unit	272,185,270.00	30 unit	372,670,000.00	30 unit	279,630,000.00	Sekretariat	
				4.04 4.04.0 2.02.26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Jumlah Jasa Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	6 Kali	24,037,625.00	6 Kali	24,037,625.00	6 Kali	23,152,250.00	6 Kali	24,985,600.00	6 Kali	25,000,000.00	5 Kali	20,000,000.00	Sekretariat	
				4.04 4.04.0 2.02.36	PEMELIHARAAN RUTIN REHAP SEDANG BERAT	Periode pemeliharaan rutin rehap sedang berat	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	199,490,000.00	-	-	-	-	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Disiplin Aparatur	100%	104,171,000.00	100%	104,171,000.00	100%	105,550,000.00	100%	60,000,000.00	100%	68,000,000.00				
				4.04.4.04.02.03.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Jumlah pakaian dinas (PDH) beserta perlengkapannya yang tersedia	80 Stel	41,500,000.00	80 Stel	41,500,000.00	80 Stel	43,450,000.00	-	-	-	-		-	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.03.05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Jumlah pakaian batik yang tersedia	80 bahan	62,671,000.00	80 bahan	62,671,000.00	80 bahan	62,100,000.00	80 bahan	60,000,000.00	80 bahan	68,000,000.00	-	-	Sekretariat	
						Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	80 stel		80 stel		80 stel		80 stel		80 stel		-			
				4.04.4.04.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	10%	133,521,230.00	10%	133,521,230.00	20%	116,406,435.00	30%	132,756,100.00	40%	150,000,000.00	40%	65,000,000.00		
				4.04.4.04.02.05.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	39,273,200.00	4 orang	39,273,200.00	4 orang	43,210,630.00	4 orang	39,609,200.00	4 orang	60,000,000.00	-	-	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.05.03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	94,248,030.00	10 orang	94,248,030.00	10 orang	73,195,805.00	10 orang	93,246,900.00	10 orang	100,000,000.00	7	85,000,000.00	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	160,643,900.00	WTP	160,643,900.00	WTP	177,427,800.00	WTP	179,052,025.00	WTP	212,900,000.00	WTP	160,400,000.00		
				4.04.4.04.02.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Buku lakip yang tersedia	45 Buku	13,875,000.00	45 Buku	13,875,000.00	45 Buku	11,525,000.00	30Buku	3,200,000.00	-	-	-	-	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.06.03	PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	Jumlah Buku Prognosis yang tersedia	10 buku	6,300,000.00	10 buku	6,300,000.00	10 buku	6,300,000.00	10 buku	2,000,000.00	-	-		-	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.06.04	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	Jumlah Buku Laporan Keuangan yang tersedia	10 buku	6,875,000.00	10 buku	6,875,000.00	10 buku	6,500,000.00	15 buku	2,725,000.00	-	-		-	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.06.07	PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN/ RKT	Jumlah Buku Renja yang tersedia	15 buku	16,593,900.00	15 buku	16,593,900.00	15 buku	20,043,600.00	15 buku	13,676,800.00	-	-		-	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.06.13	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	4 Dokumen	107,900,000.00	4 Dokumen	107,900,000.00	4 Dokumen	133,059,200.00	4 Dokumen	95,190,905.00	4 Dokumen	112,900,000.00	4 Dokumen	95,400,000.00	Bidang Perbendaharaan	
				4.04.4.04.02.06.14	MONITORING EVALUASI REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen laporan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	62,359,320.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	65,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.06.15	PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	Jumlah Buku Laporan Tahunan	16 buku	9,100,000.00	16 buku	9,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	
				4.04.4.04.02.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Target PAD	100,76%	4,746,796,208.00	100,76%	4,746,796,208.00	102,05 %	4,803,039,056.00	108,15 %	5,344,328,338.00	100%	6,340,908,360.00	100%	4,426,845,000.00		
			Persentase Legalitas Tanah Aset Pemerintah			31,50%		31,50%		33%		35%		38%		38%				
			Jumlah dokumen keuangan daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku			5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		
			Persentase Realisasi serapan BL,BTL, Pembiayaan			89.54%		89.54%		95.46%		94,17%		89.90%		89.90%				
			Persentase Optimasias i aset yang tidak lagi dimanfaatkan			#####		#####		#####		#####		0.0043%		0.0043%				
			Ketepatan waktu laporan barang milik daerah yang wajar			Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.02	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	280 buku	117,405,300.00	280 buku	117,405,300.00	280 buku	148,650,600.00	280 buku	187,903,700.00	280 buku	200,000,000.00	280 buku	126,100,000.00	Bidang Aset	
				4.04.4.04.02.15.04	PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN ASET DAERAH	Jumlah Dokumen Laporan Penjualan dan Penghapusan Aset	5 Dokumen	192,313,200.00	5 Dokumen	192,313,200.00	5 Dokumen	238,138,400.00	5 Dokumen	166,102,283.00	5 Dokumen	249,650,000.00	5 Dokumen	163,350,000.00	Bidang Aset	
						Jumlah Dokumen Penilaian Aset yang akan dilelang/dihapus	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Penilaian Aset yang akan dipindahtangankan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				4.04.4.04.02.15.06	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	Jumlah Dokumen	4 dokumen	252,499,719.00	4 dokumen	252,499,719.00	4 dokumen	387,263,701.00	4 dokumen	480,400,500.00	4 dokumen	350,000,000.00	4 dokumen	621,760,000.00	Bidang Anggaran	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.08	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	Jumlah Dokumen	4 dokumen	186,001,947.00	4 dokumen	186,001,947.00	4 dokume n	218,453,498.00	4 dokume n	207,067,431.00	4 dokumen	204,600,000.00	4 dokumen	250,200,000.00	Bidang Anggaran	
				4.04.4.04.02.15.10	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	101,514,400.00	2 Dokumen	101,514,400.00	2 Dokum en	105,936,000.00	2 Dokum en	116,490,700.00	2 Dokumen	160,000,000.00	2 Dokumen	140,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				4.04.4.04.02.15.11	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	96,555,635.00	2 Dokumen	96,555,635.00	2 Dokum en	102,129,200.00	2 Dokum en	84,849,900.00	2 Dokumen	135,000,000.00	2 Dokumen	112,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.14	SOSIALISASI DAN BIMTEK PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Bimtek dan sosialisasi	1 Kali	130,946,800.00	1 Kali	130,946,800.00	1 Kali	192,702,622.00	1 Kali	176,391,565.00	1 Kali	192,000,000.00	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				4.04.4.04.02.15.16	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	125,394,350.00	4 Dokumen	125,394,350.00	4 Dokumen	162,995,000.00	4 Dokumen	-	-	-	-	-	Bidang Aset	
				4.04.4.04.02.15.19	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Potensi Pajak Daerah	1 Jenis Pajak	476,261,800.00	1 Jenis Pajak	476,261,800.00	1 Jenis Pajak	246,248,500.00	1 Jenis Pajak	752,943,872.00	1 Jenis Pajak	628,600,000.00	1 Jenis Pajak	439,600,000.00	Bidang Pendapatan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.20	PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah perangkat daerah yang memiliki aplikasi pengelolaan keuangan	40 OPD	287,807,697.00	40 OPD	287,807,697.00	40 OPD	315,108,865.00	40 OPD	447,285,077.00	40 OPD	676,438,380.00	40 OPD	238,000,000.00	Bidang Anggaran	
				4.04.4.04.02.15.22	PENATAAN ADMINISTRASI PEMBELANJAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah dokumen	4 Dokumen	349,423,331.00	4 Dokumen	349,423,331.00	4 Dokumen	374,510,085.00	4 Dokumen	298,505,983.00	4 Dokumen	542,110,000.00	4 Dokumen	392,110,000.00	Bidang Perbendaharaan	
				4.04.4.04.02.15.23	PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN GAJI KABUPATEN TEBO	Jumlah Dokumen gaji (daftar gaji)	1 Dokumen	405,810,768.00	1 Dokumen	405,810,768.00	1 Dokumen	383,883,398.00	1 Dokumen	356,868,181.00	1 Dokumen	522,460,000.00	1 Dokumen	305,175,000.00	Bidang Perbendaharaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.24	PENYUSUNAN PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	Jumlah Buku Laporan Keuangan Tugas Pembantuan	125 Buku	7,330,000.00	125 Buku	7,330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				4.04.4.04.02.15.25	PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENATAAN ASET/BARANG	Jumlah Jasa Pemeliharaan aplikasi SIMBADA	1 Paket	276,324,338.00	1 Paket	276,324,338.00	1 Paket	183,335,239.00	1 Paket	168,188,500.00	1 Paket	250,000,000.00	1 Paket	191,500,000.00	Bidang Aset	
				4.04.4.04.02.15.29	INVENTARISASI LABELISASI ASET DAERAH	Jumlah Dokumen laporan data aset daerah	45 Dokumen	387,160,170.00	45 Dokumen	387,160,170.00	45 Dokumen	395,853,666.00	45 Dokumen	465,989,000.00	45 Dokumen	574,700,000.00	45 Dokumen	378,200,000.00	Bidang Aset	
				4.04.4.04.02.15.38	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN KABUPATEN TEBO	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran Kab. Tebo	100 Buku	51,852,800.00	100 Buku	51,852,800.00	100 Buku	62,219,200.00	100 Buku	56,600,000.00	100 Buku	67,600,000.00	100 Buku	47,600,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.37	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN KABUPATEN TEBO	Jumlah Buku Laporan keuangan Akhir Tahun	50 Buku	105,101,500.00	50 Buku	105,101,500.00	50 Buku	119,460,889.00	50 Buku	105,273,700.00	50 Buku	129,900,000.00	50 Buku	129,900,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				4.04.4.04.02.15.38	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN KABUPATEN TEBO	Jumlah Buku Laporan Prognosis Kab. Tebo	50 Buku	62,055,600.00	50 Buku	62,055,600.00	50 Buku	69,649,700.00	50 Buku	75,866,600.00	50 Buku	75,000,000.00	50 Buku	54,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				4.04.4.04.02.15.39	PENYUSUNAN BAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH	Jumlah PERDA Pajak Daerah	-	47,862,600.00	-	47,862,600.00	12 Peraturan Daerah	81,243,485.00	-	-	-	-	-	-	Bidang Pajak dan Pendapata n lainnya	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.40	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH	Jumlah Kecamatan	12 Kecamatan	238,749,000.00	12 Kecamatan	238,749,000.00	12 Kecamatan	114,156,000.00	12 Kecamatan	72,376,737.00	12 Kecamatan	123,000,000.00	12 Kecamatan	63,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan lainnya	
				4.04.4.04.02.15.41	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CALON WAJIB PAJAK DAERAH	Jumlah Jenis Pajak	3 Jenis Pajak Daerah	40,500,500.00	3 Jenis Pajak Daerah	40,500,500.00	3 Jenis Pajak Daerah	69,266,400.00	3 Jenis Pajak Daerah	-	-	-	-	Bidang Pajak dan Pendapatan lainnya		
				4.04.4.04.02.15.42	PENETAPAN PAJAK DAERAH	Jumlah Jenis Pajak	3 Jenis Pajak Daerah	288,912,000.00	3 Jenis Pajak Daerah	288,912,000.00	3 Jenis Pajak Daerah	181,954,282.00	3 Jenis Pajak Daerah	305,334,000.00	3 Jenis Pajak Daerah	228,850,000.00	3 Jenis Pajak Daerah	211,850,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan lainnya	
				4.04.4.04.02.15.43	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	Persentase realisasi Pajak Daerah terhadap ketetapan Pajak Daerah	100%	158,904,160.00	100%	158,904,160.00	100%	109,308,200.00	100%	259,205,100.00	100%	398,500,000.00	100%	247,500,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan lainnya	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyssualan Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.44	PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB SERTA PENGELOLAAN BASIS INFORMASI PAJAK	Jumlah Akurasi data Potensi PBB-P2	1 Kelurahan	125,000,000.00	1 Kelurahan	125,000,000.00	1 Kelurahan	42,593,442.00	-	-	-	-	-	-	Bidang Pajak dan Pendapata n lainnya	
				4.04.4.04.02.15.45	EVALUASI PAJAK DAERAH	Persentase Realisasi terhadap Target Pajak Daerah	105,61%	58,728,400.00	105,61%	58,728,400.00	120,48 %	113,037,294.00			-	-	-	-	Bidang Pajak dan Pendapata n lainnya	
				4.04.4.04.02.15.47	PENGEMBAN GAN APLIKASI PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL	Jumlah Bimtek dan sosialisasi	1 kali	176,380,193.00	1 kali	176,380,193.00	1 kali	212,292,300.00	1 kail	173,061,873.00	1 kali	232,500,000.00	1 kali	123,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				4.04.4.04.02.15.48	PENYUSUNA N KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTA H DAERAH	Jumlah buku kebijakan akuntansi pemerintah daerah	-	-	-	-	100 buku	68,584,800.00	100 buku	-	-	-	-	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.04.4.04.02.15.49	PENGAMANAN KEPEMILIKAN ASET/BARANG MILIK DAERAH	Jumlah dokumen kepemilikan aset tetap tanah sebagai salah satu pengamanan fisik	-	-	-	-	1 Dokumen	108,084,500.00	1 Dokumen	258,717,566.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	184,000,000.00	Bidang Aset	
				4.04.4.04.02.15.50	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Pengurus barang OPD yang terlatih	-	-	-	-	-	-	40 Orang	128,908,090.00	40 Orang	200,000,000.00	40 Orang	8,000,000.00	Bidang Aset	
				2.12.4.04.02.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah penyelenggaraan Pameran Investasi	1 kali	32,411,350.00	1 kali	32,411,350.00	1 kali	24,490,500.00	1 kali	34,087,000.00	1 kali	35,000,000.00	-	-	Sekretariat	
				2.12.4.04.02.15.10	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	Jumlah penyelenggaraan Pameran Investasi	1 kali	32,411,350.00	1 kali	32,411,350.00	1 kali	24,490,500.00	1 kali	34,087,000.00	1 kali	35,000,000.00	-	-	Sekretariat	
				4.03.4.04.02.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan Dengan Ketentuan yang Berlaku							2 Dokumen	150,838,993.00	2 Dokumen	102,850,000.00	2 Dokumen	97,650,000.00	Bidang Anggaran	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi						APBD Murni		Penyesuaian Covid 19		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4.03.4.04.02.2.1.22	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS						-	2 Dokumen	150,838,993.00	2 Dokumen	102,650,000.00	2 Dokumen	97,650,000.00	Bidang Anggaran	

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	(1) Opini BPK (2) Persentase capaian pendapatan daerah	(1) Terwujudnya Kinerja dan penat usahaan keuangan daerah yang Akuntabel		5								14,125,153,670.23		15,192,366,564.48		29,317,520,234.71		Badan Keuangan Daerah
				5	02							9,541,303,670.23		10,044,166,564.48		19,585,470,234.71		
				5	02	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	7,219,118,346.23	100 Persen	7,399,596,304.88	100 Persen	14,618,714,651.11		
										Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	100 Persen	2,322,185,324.00	100 Persen	2,644,570,259.60	100 Persen	4,966,755,583.60		
				5	02	01	202		Administrasi Keuangan	Persentase pembayaran gaji ASN dan Tunjangan ASN	100 Persen	7,219,118,346.23	100 Persen	7,399,596,304.88	100 Persen	14,618,714,651.11	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	46 Orang	7,219,118,346.23	46 Orang	7,399,596,304.88	92 Orang	14,618,714,651.11	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	1,995,185,324.00	100 Persen	2,251,570,259.60	100 Persen	4,246,755,583.60	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				5	02	01	203	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000 untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	2700 Lembar	12,600,000.00	2700 Lembar	12,600,000.00	5400 Lembar	25,200,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
										Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan	5 Orang	60,000,000.00	5 Orang	60,000,000.00	10 Orang	120,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	229,521,889.00	12 Bulan	229,521,889.00	24 Bulan	459,043,778.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan premi asuransinya	29 Orang	5,500,000.00	29 Orang	5,500,000.00	58 Orang	11,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang di bayarkan asuransinya	7 Unit	45,000,000.00	7 Unit	45,000,000.00	14 Unit	90,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	34 Unit	15,000,000.00	34 Unit	15,000,000.00	68 Unit	30,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya	30 Orang	369,000,000.00	30 Orang	369,000,000.00	60 Orang	738,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli	41 Jenis	25,000,000.00	41 Jenis	25,000,000.00	82 Jenis	50,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
									Jumlah tenaga Kebersihan yang dibayarkan honorinya	5 Orang	60,000,000.00	5 Orang	60,000,000.00	10 Orang	120,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				5	02	01	203	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	70	Unit	34,961,474.96	70	Unit	34,400,000.00	140	Unit	69,361,474.96	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang di beli	80	Jenis	160,000,000.00	80	Jenis	160,000,000.00	160	Jenis	320,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang tersedia	7	Jenis	85,000,000.00	7	Jenis	85,000,000.00	14	Jenis	170,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang tersedia	25	Jenis	15,000,000.00	25	Jenis	15,000,000.00	50	Jenis	30,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	8	Unit	33,000,000.00	8	Unit	33,000,000.00	16	Unit	66,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30	Media	60,000,000.00	30	Media	60,000,000.00	60	Media	120,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2	Jenis	35,000,000.00	2	Jenis	35,000,000.00	4	Jenis	70,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	152	Kali	300,000,000.00	152	Kali	480,000,000.00	304	Kali	780,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5	02	01	203	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC yang dibeli	4 Unit	24,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	9 Unit	74,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meja Ruang Pertemuan yang dibeli	23 Unit	46,000,000.00	23 Unit	46,000,000.00	46 Unit	92,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
										Jumlah Kursi Ruang Pertemuan yang dibeli	40 Unit	32,000,000.00	62 Unit	62,000,000.00	102 Unit	94,000,000.00		
				5	02	01	203	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	1 Unit	5,000,000	1 Unit	15,000,000	2 Unit	20,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	26,000,000	1 Unit	30,000,000	2 Unit	56,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
										Jumlah Penjaga Kantor yang dibayarkan	2 Orang	24,000,000	2 Orang	24,000,000	4 Orang	48,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	203	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	34 Unit	267,601,960.04	34 Unit	268,548,370.60	68 Unit	536,150,330.64	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
								Jumlah Sopir Kepala Badan yang dibayarkan	1 OB	12,000,000	1 OB	12,000,000	2 OB	24,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah		
								5	02	01	203	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	28 Unit	14,000,000.00	28 Unit	20,000,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				5	02	01	204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100	Persen	327,000,000.00	100	Persen	393,000,000.00	100	Persen	720,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	204	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH) beserta perlengkapannya yang tersedia	80	Stel	40,000,000	80	Stel	40,000,000	160	Stel	80,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	204	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang tersedia	80	Stel	26,000,000	80	Stel	34,000,000	160	Stel	60,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
										Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	80	Stel	26,000,000	80	Stel	34,000,000	160	Stel	60,000,000.00		
				5	02	01	204	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	Orang	50,000,000.00	2	Orang	50,000,000.00	4	Orang	100,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	204	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi	2	kali	100,000,000.00	2	kali	150,000,000.00	4	kali	250,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5	02	01	204	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan	10	Orang	85,000,000.00	10	Orang	85,000,000.00	20	Orang	170,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan Daerah
				5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4,583,850,000.00		5,148,200,000.00		9,732,050,000.00				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			(1) Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD terbit sesuai dengan aturan yang berlaku	100	Persen	950,000,000.00	100	Persen	1,005,000,000.00	100	Persen	1,955,000,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah
										Persentase dokumen keuangan daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku.	100	Persen	1,163,500,000.00	100	Persen	1,270,000,000.00	100	Persen	2,423,500,000.00	Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah
										Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang sesuai SAP	100	Persen	632,000,000.00	100	Persen	725,000,000.00	100	Persen	1,357,000,000.00	Bidang Akuntansi	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen keuangan daerah yang terbit	8	Dokumen	950,000,000.00	8	Dokumen	1,005,000,000.00	16	Dokumen	1,955,000,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	201	1	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2	Dokumen	43,750,000.00	2	Dokumen	50,000,000.00	4	Dokumen	93,750,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	201	2	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	38,750,000.00	2	Dokumen	50,000,000.00	4	Dokumen	88,750,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah
					2	2	201	5	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perkada APBD	4	Dokumen	572,000,000.00	4	Dokumen	590,750,000.00	8	Dokumen	1,162,750,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(3) Persentase Serapan Belanja Daerah	5	2	2	201	6	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda P-APBD dan Perkada P-APBD	4 Dokumen	132,500,000.00	4 Dokumen	151,250,000.00	8 Dokumen	283,750,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	201	7	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	163,000,000.00	2 Kali	163,000,000.00	4 Kali	326,000,000.00	Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan realisasi ≥ 75%	100 Persen	1,153,500,000.00	100 Persen	1,270,000,000.00	100 Persen	2,423,500,000.00	Bidang Perbendaharaan	
				5	2	2	202	3	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan	936 dokumen	418,500,000.00	936 dokumen	425,000,000.00	1872 dokumen	843,500,000.00	Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	202	4	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Persentase SPD dan SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari kerja	100 Persen	350,000,000.00	100 Persen	420,000,000.00	100 Persen	770,000,000.00	Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	202	5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Persentase Penelitian Kelengkapan Dokumen yang terbit kurang dari 2 (dua) hari kerja	100 Persen	300,000,000.00	100 Persen	320,000,000.00	100 Persen	620,000,000.00	Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			(2) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	2	2	202	8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekon	934	Dokumen	85,000,000.00	934	Dokumen	105,000,000.00	1868	Dokumen	190,000,000.00	Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	203		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	40	Dokumen	632,000,000.00	40	Dokumen	725,000,000.00	80	Dokumen	1,357,000,000.00	Bidang Akuntansi	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	203	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	97,000,000.00	2	Dokumen	97,000,000.00	4	Dokumen	194,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	203	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	144,000,000.00	2	Dokumen	144,000,000.00	4	Dokumen	288,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan Daerah
				5	2	2	203	5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran Kab. Tebo	50	Buku	20,000,000.00	50	Buku	55,000,000.00	100	Buku	75,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan Daerah
										Jumlah Buku Laporan keuangan Akhir Tahun	100	Buku	111,500,000.00	100	Buku	134,500,000.00	200	Buku	246,000,000.00		
										Jumlah Buku Laporan Prognosis Kab. Tebo	50	Buku	20,000,000.00	50	Buku	55,000,000.00	100	Buku	75,000,000.00		
				5	2	2	203	7	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah Dokumen Laporan	1	Dokumen	48,500,000.00	1	Dokumen	48,500,000.00	2	Dokumen	97,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				5	2	2	203	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah buku kebijakan akuntansi pemerintah daerah	80	Buku	65,500,000.00	80	Buku	65,500,000.00	160	Buku	131,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan Daerah
		(2) Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib	(1) Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan	5	2	2	203	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang memahami penyusunan laporan keuangan	40	Orang	125,500,000.00	40	Orang	125,500,000.00	40	Orang	251,000,000.00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan Daerah
				6	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah sesuai aturan yang berlaku	100	Persen	958,350,000.00	100	Persen	1,173,200,000.00	100	Persen	2,131,550,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah
				6	2	3	201		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan KIB OPD Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	40	OPD	958,350,000.00	40	OPD	1,173,200,000.00	40	OPD	2,131,550,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah
				5	2	3	201	1	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	250	Buku	120,000,000.00	250	Buku	130,000,000.00	500	Buku	250,000,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah
				5	2	3	201	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen laporan data aset daerah	45	Dokumen	300,000,000.00	45	Dokumen	378,200,000.00	90	Dokumen	678,200,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah
				5	2	3	201	7	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	350	Dokumen	200,000,000.00	400	Dokumen	300,000,000.00	400	Dokumen	500,000,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		(3) Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	(1) Persentase capaian pendapatan daerah	5	2	3	201	9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penghapusan	5	Dokumen	163,350,000.00	5	Dokumen	165,000,000.00	10	Dokumen	328,350,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah
				5	2	3	201	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Pengguna yang berkompeten	80	Orang	175,000,000.00	80	Orang	200,000,000.00	160	Orang	375,000,000.00	Bidang Aset	Badan Keuangan Daerah
				5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian target pendapatan daerah	98	Persen	890,000,000.00	98.5	Persen	975,000,000.00	98.5	Persen	1,865,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya	Badan Keuangan Daerah
				5	2	4	202		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian target pendapatan daerah	98	Persen	890,000,000.00	98.5	Persen	975,000,000.00	98.5	Persen	1,865,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya	Badan Keuangan Daerah
			(2) Persentase Rasio Kemendirian Keuangan Daerah	5	2	4	202	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	99	Persen	400,000,000.00	100	Persen	440,000,000.00	100	Persen	840,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya	Badan Keuangan Daerah
			5	2	4	202	4	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pajak	9	Jenis Pajak	200,000,000.00	9	Jenis Pajak	220,000,000.00	9	Jenis Pajak	420,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya	Badan Keuangan Daerah	
			5	2	4	202	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Piutang pajak	15	Persen	230,000,000.00	13	Persen	250,000,000.00	13	Persen	480,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya	Badan Keuangan Daerah	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	2	4	202	11	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5	2	4	202	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kecamatan	12 Kecamatan	60,000,000.00	12 Kecamatan	65,000,000.00	12 Kecamatan	125,000,000.00	Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya	Badan Keuangan Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun indikator kinerja perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sebelum perubahan RPJMD Kab. Tebo 2017-2022 tersaji dalam Tabel 7.1 :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

No	Indikator	Capaian awal tahun RPJMD (2017)	Capaian setiap Tahun		Target Capaian Tahun
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	<u>Indikator Kinerja Utama</u>				
	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase serapan belanja daerah	89,54%	95,46%	94,17%	90,00%

No	Indikator	Capaian awal tahun RPJMD (2017)	Capaian setiap Tahun		Target Capaian Tahun
			2018	2019	2020
	Persentase Aset tetap yang dimanfaatkan	0,0068%	0,0064%	0,0076%	0,0079%
	Persentase Aset tetap yang digunakan	99,93%	99,93%	99,95%	99,97%
	Persentase capaian pendapatan daerah	95,69%	100,47%	99,247%	98,00%
	Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	8,76%	9,44%	9,88%	7,50%
2	Indikator Kinerja Porgram				
	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%
	Persentase Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	10%	20%	31%	40%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Capaian Target PAD	91,24%	102,19%	107,98%	100%
	Persentase Legalitas Tanah Aset Pemerintah	31,50%	33,00%	35,00%	38%
	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Persentase Realisasi Serapan BL, BTL, Pembiayaan	89.54%	95%	94,17%	89.90%
	Persentase Optimalisasi aset yang tidak lagi dimanfaatkan	0.0053%	0.0054%	0.0043%	0.0043%
	Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah yang Wajar	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali

Sejalan dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo maka Indikator kinerja perangkat daerah juga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan Misi III yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan menjalankan Tujuan 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 tersaji dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021-2022 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

No	Indikator	Target Capaian setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1	<u>Indikator Kinerja Utama</u>			
	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
	Persentase serapan belanja daerah	95,00%	90,00%	90,00%
	Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan	0,0081%	0,0079%	0,0079%
	Persentase Aset Tetap yang di Gunakan	99,98%	99,97%	99,97%
	Persentase capaian pendapatan daerah	98,00%	98,00%	98,00%
	Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	8,00%	8,00%	8,00%
2	<u>Indikator Kinerja Program</u>			
	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD terbit sesuai dengan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase dokumen keuangan daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku.	100.00%	100.00%	100.00%
	Pesentase Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang sesuai SAP	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase Laporan BMD Yang Sesuai Dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase capaian target pendapatan daerah	98.00%	98.50%	98.50%

No	Indikator	Target Capaian setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	
1	2	3	4	5
3	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>			
	Persentase pembayaran gaji ASN dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%
	Persentase Disiplin Aparatur	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen keuangan daerah yang terbit	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
	Persentase OPD dengan realisasi \geq 75%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen
	Jumlah Laporan KIB OPD Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	40 OPD	40 OPD	40 OPD
	Persentase capaian target pendapatan daerah	98,00%	98,05%	98,05%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah dilaksanakan melalui pembangunan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 (sedang berjalan) dalam dokumen Renja. Capaian pembangunan Tahun 2017, 2018, 2019 telah memberikan gambaran kondisi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Berdasarkan pengendalian dan evaluasi Renstra, serta berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Tebo, maka perlu dilakukan penyesuaian, perbaikan dan perubahan dalam kebijakan.

Keberhasilan pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam perwujudan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2022.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 menjadi lebih baik.

Kepala Badan Keuangan Daerah 8



NAZAR EFENDI, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800501 200212 1 002

